

**PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
TAX AVOIDANCE DI PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI INDONESIA**

Tesis S2

Program Magister Akuntansi



Diajukan Oleh:

Desy Khoiriyati Rodhini

18919003

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

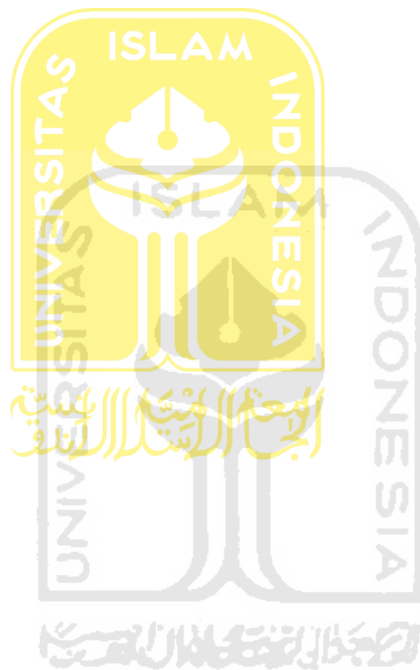
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 September 2020



Desy Khoiriyati Rodhini

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 28 September 2020

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink that reads 'Ayu Chairina-Laksmi'.

Ayu Chairina-Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., Ph.D., Ak., CA.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

DESY KHOIRIYATI RODHINI

No. Mhs. : 18919003

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE DI
PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI INDONESIA**


Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., Ph.D., Ak., CA.

Penguji II



Dra. Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi,



Drs. Dekar Urumsah, SSi., M.Com., Ph.D., CfrA.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamiin, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* di Perusahaan Multinasional di Indonesia”** Tesis ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi (S2) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. terselesainya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com (IS)., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Ayu Chairina Laksmi, S.E., M.AppCom., M.Res., Ph.D., Ak, CA selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing selama penyusunan tesis ini.
6. Ibu Dra. Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D, selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan saran dan masukan bagi kesempurnaan tesis ini.
7. Seluruh dosen dan karyawan karyawan di lingkungan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

8. Kepada kedua orang tua Bapak Ir. Sutarno. MM dan Ibu Royani serta kakak tercinta Aditya Nugroho ST, MT dan Betty Nurul Hidayati SE, Akt yang telah memberikan doa, motivasi serta dukungan moril dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.
9. Seluruh teman-teman Magister Akuntansi Angkatan 17 yang telah saling mendukung dan memberikan sumbangan pemikiran, motivasi sehingga penulisan ini dapat diselesaikan.
10. Kepada seluruh pihak yang membantu melancarkan demi terselesainya penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu masukan berupa kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan serta bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 31 Agustus 2020

Penulis



Desy Khoiriyati Rodhini

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* 2) untuk menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* 3) untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari *website* Bursa Efek Indonesia diakses dari www.idx.co.id. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Kriteria sampel yang digunakan adalah perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan rumus regresi linier berganda menunjukkan bahwa 1) komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* 2) kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* 3) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dibuktikan dari ketiga variabel yang memiliki skor pengaruh paling tinggi adalah kualitas audit. Semakin tinggi kualitas audit yang diaudit oleh auditor profesional akan menghasilkan kualitas audit yang baik, sehingga akan semakin sulit perusahaan melakukan *tax avoidance* karena kemungkinan perusahaan memanipulasi data akan semakin kecil.

Kata Kunci: *Corporate Governance, Tax Avoidance, Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Manajerial.*

ABSTRACT

This research aims 1) to analyze the effect of the audit committee on tax avoidance 2) to analyze the effect of audit quality on tax avoidance 3) to analyze the effect of managerial ownership on tax avoidance. The research method used are quantitative research methods. The data source used is secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange website accessed from www.idx.co.id. The method of data collection using method of documentation and literature study. The sample criteria used multinational companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018. Sampling was done by purposive sampling. The analytical tool used is descriptive analysis and multiple linear regression analysis.

The results of hypothesized testing conducted by the multiple linearic regression formulas indicate that 1) The audit committee has a significant positive effect on multinational company tax avoidance, 2)The quality of audit has a significant positive effect on tax avoidance of multinational companies, 3) managerial ownership significantly negative effect on the tax avoidance of multinasional companies.

Based on the results of the proven hypothesis testing of three variables have the highest influence score is the audit quality. The higher quality Audit audited by professional auditors will result in the quality of audit, that the company audit will be increasingly difficult to do tax avoidance, because it is likely the company manipulating data will be smaller.

Keywords: *Corporate Governance, Tax Avoidance, Audit Committee, Audit Quality, Managerial Ownership*

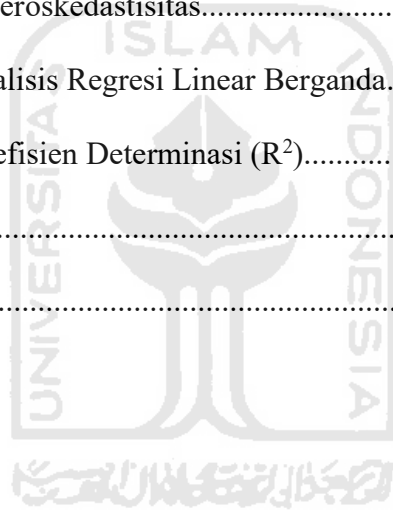
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ... Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.	
HALAMAN PERSETUJUAN Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.	
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	25
2.4 Kerangka Penelitian.....	30

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Desain Penelitian.....	31
3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya.....	33
3.5 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. Deskripsi Data.....	42
4.2. Pengujian Asumsi Klasik.....	45
4.3. Pengujian Hipotesis.....	49
4.4. Pembahasan Hasil Penelitian.....	554
BAB V PENUTUP.....	58
5.1. Kesimpulan.....	58
5.2. Implikasi Penelitian.....	59
5.3. Saran.....	620
DAFTAR PUSTAKA.....	632
LAMPIRAN.....	687

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur <i>Corporate Governance</i>	16
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 4.1	Ringkasan Prosedur Pengambilan Sampel.....	42
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	43
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas.....	46
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinieritas.....	47
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi.....	48
Tabel 4.6	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	49
Tabel 4.7	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	50
Tabel 4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	51
Tabel 4.9	Hasil Uji F.....	52
Tabel 4.10	Hasil Uji T.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Realisasi APBN 2014 – 2019.....	2
Gambar 2.1	Kerangka Penelitian.....	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Data Perusahaan.....	67
Lampiran II	Hasil Olahan SPSS Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

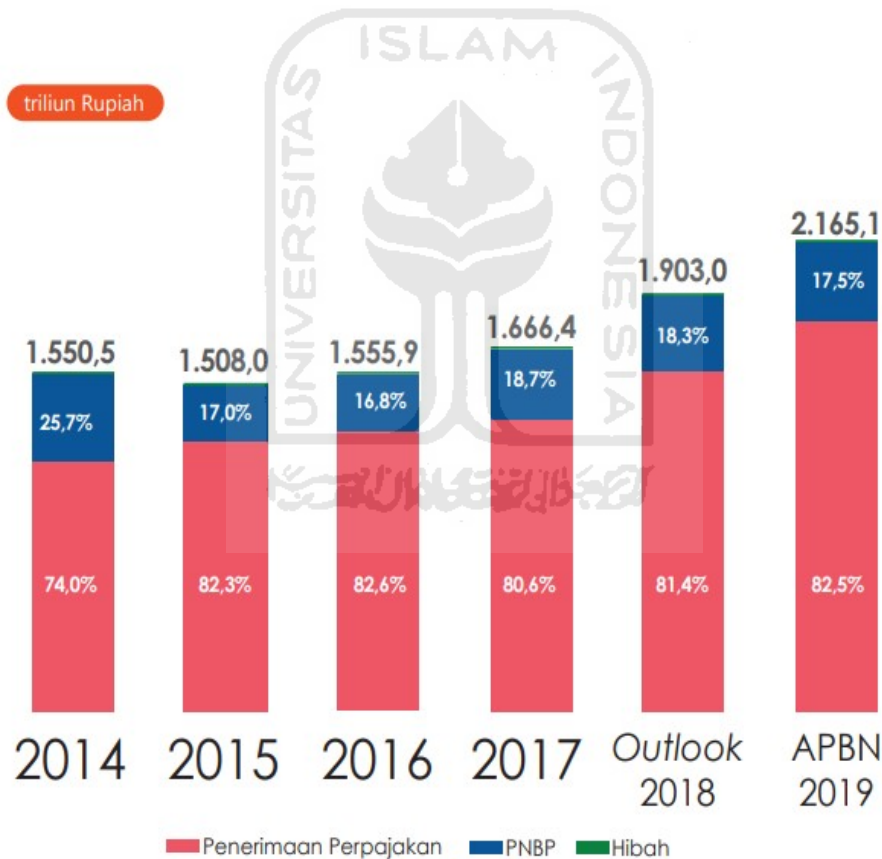
1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, banyak perusahaan yang menerapkan praktik *corporate governance* untuk meminimalisasi risiko bisnis yang mungkin terjadi. Peran *corporate governance* sebagai mekanisme struktur dan sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat diperlukan. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan mempunyai kinerja yang baik dan efisien. Dengan diterapkannya *corporate governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para *stakeholder*. Penerapan prinsip *corporate governance* dianggap sebagai suatu keharusan agar nilai perusahaan dapat terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan bisnisnya. Keberadaan sistem tata kelola perusahaan yang baik juga dianggap perlu untuk membantu perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai (Khoiriyah, 2019).

Corporate governance memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan termasuk keputusan perpajakan, tetapi di sisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Winata, 2014). Ketika dinamika *corporate governance* tidak sesuai dengan tata kelola dan prinsip, serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Penerapan *corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan

pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba yang besar akan dikenakan beban pajak yang besar.

Pajak merupakan primadona penerimaan negara yang sangat dominan dalam struktur Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Data Kementerian Keuangan pada tahun 2014-2019 menunjukkan bahwa kontribusi pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN bisa dilihat dalam Gambar 1.1.



Sumber: www.kemenkeu.go.id/media/11226/buku-informasi-apbn-2019.pdf

Gambar 1.1
Realisasi APBN 2014-2019

Meningkatnya komposisi yang besar pada penerimaan pajak tiap tahun sangat ironi dengan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, data statistik menunjukkan jumlah badan usaha yang terdaftar sebanyak Rp5juta, sedangkan yang terdaftar sebagai wajib pajak hanya Rp1,9juta dan yang membayar pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) hanya Rp520ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4% (Rusydi, 2014).

Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia merupakan salah satu indikasi adanya praktik *tax avoidance*. Praktik agresif *tax avoidance* di Indonesia sebenarnya cukup banyak. Pada 2018, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) Dua Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menargetkan penerimaan sebesar Rp21,39triliun dari PMA, namun hingga semester I 2018, realisasinya baru 43% atau Rp9,2triliun (<https://finance.detik.com/>). Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan PMA atau perusahaan multinasional di Indonesia yang sebagian besar memiliki nilai aset yang besar melakukan tindakan *tax avoidance* dalam operasionalnya. Dalam penelitian Nugraheni dan Pratomo (2018), tindakan *tax avoidance* akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan karena membayar pajak serendah mungkin, sedangkan dari sisi perpajakan tindakan *tax avoidance* dapat memberikan dampak kerugian yang cukup besar bagi negara meskipun tidak melanggar peraturan perpajakan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, persoalan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional bukan hal yang baru. DJP telah mengidentifikasi ribuan investasi asing yang ditengarai melakukan *tax*

avoidance. Indikasi itu muncul lantaran, para pemilik investasi asing kendati sudah melakukan aktivitas usaha selama puluhan tahun tak pernah menyampaikan keuntungannya (Klinik Pajak, 2017). Kementerian Keuangan sendiri telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016 yang mewajibkan perusahaan dalam negeri yang terafiliasi dengan konglomerasi di luar negeri untuk menyampaikan *country by country report* atau laporan per negara.

Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya *tax avoidance*. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011). Salah satu kasus *tax avoidance* adalah PT Adaro Energy Tbk yang melakukan transaksi *transfer pricing* dengan anak perusahaannya yang berada di Singapura, Coaltrade Service International sejak tahun 2009 sampai 2017 yang menyebabkan pembayaran pajak hanya sebesar US\$125juta atau Rp1,75triliun (kurs Rp14.000) lebih rendah dari yang sebenarnya yang harus dibayarkan di Indonesia (CNBC Indonesia, 2019).

Menurut Santoso (2014) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal. Dengan adanya *tax avoidance* disebabkan oleh lemahnya *corporate governance* yang diterapkan di dalam perusahaan. Terjadinya *tax avoidance* dipengaruhi oleh adanya teori

keagenan yang dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara principal dengan agen, sehingga masing-masing pihak akan berusaha untuk mengoptimalkan kepentingan pribadinya.

Putranti (2015) menyatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) bukanlah penggelapan pajak (*tax evasion*). Selama ini diperbolehkan adalah penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan hanya memanfaatkan celah atau *loophole* dari aturan yang berlaku, seperti ketiadaan aturan atas suatu transaksi, sehingga Wajib Pajak tidak dapat divonis melakukan pelanggaran undang-undang. Tindakan *tax avoidance* biasanya dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Menunda penghasilan;
2. *Tax arbitrage* yang memanfaatkan perbedaan tarif; dan
3. *Tax arbitrage* untuk memanfaatkan perbedaan perlakuan pajak.

Penundaan penghasilan dilakukan dengan tujuan untuk menunda pembayaran pajak, seperti penundaan pembagian deviden dari anak perusahaan di luar negeri kepada pemegang saham. Bentuk lain *tax avoidance* adalah memanfaatkan perbedaan tarif. Pada umumnya perbedaan tarif ini terkait dengan pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tax avoidance* dengan memanfaatkan perlakuan pajak yang berbeda dapat terjadi bila perbedaan perlakuan tersebut dapat mengakibatkan kewajiban pajak yang berbeda, seperti perbedaan perlakuan pajak berdasarkan *net income* dan omset usaha (*presumptive tax*). Dalam konteks perpajakan internasional, terdapat berbagai skema yang biasa

diajukan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan penghematan pajak yaitu dengan skema: *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping* dan *controlled foreign corporation* (Putranti, 2015).

Dalam melakukan praktik *tax avoidance*, perusahaan dipengaruhi oleh *corporate governance* (Winata, 2014). Namun dari sisi pemerintah dalam upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak tidak lepas dari sebuah kendala. Penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkannya dengan melakukan praktik *tax avoidance* tersebut.

Menurut Fadhilah (2014) mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* ada dua yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme eksternal adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar. Pada penelitian ini akan lebih difokuskan pada komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan manajerial.

Komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) mengharuskan semua emitmen untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen sesuai dengan surat edaran yang ada

sekurang - kurangnya komite audit dalam perusahaan terdiri atas tiga orang (Cahyono, 2016). Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern (Fadhilah, 2014). Komite audit sesuai fungsinya membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan, sehingga dapat mencegah asimetri informasi.

Tanggung jawab komite audit dalam *corporate governance* adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan. Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif (Diantari, 2016). Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance*. Menurut Winata (2014) dan Fadhilah (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Calvin (2015) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau

kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati,2014). Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari *corporate governance*. Transparansi merupakan salah satu faktor penting untuk menilai kualitas audit, karena adanya transparansi maka para pemegang saham dapat mengetahui informasi-informasi terkait perpajakan (Nugraheni, 2018). Dalam kaitannya dengan pajak perusahaan, maka perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Sehingga untuk menjamin kualitas informasi dalam perpajakan pada perusahaan maka dibutuhkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan agar pada perusahaan dapat terjamin reliabilitas informasinya. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Eksandy (2017) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Winata (2014) menemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan manajerial diasumsikan sebagai mekanisme pengendalian internal dan berfungsi sebagai monitoring positif untuk mengurangi konflik keagenan. Kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (Rejeki, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan Charisma (2019) menyatakan besar kecilnya kepemilikan entitas oleh manajer menggambarkan adanya kesamaan tujuan antara *principle* dan *agent*, sehingga akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan mengesampingkan kepentingan pribadi agar

penghindaran pajak tidak terjadi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Pramudito (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Prasetyo (2018) dan Mahulae (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan memberikan hasil yang tidak konsisten membuat penulis tertarik untuk mengangkat kembali topik mengenai *tax avoidance* dengan menggunakan struktur *corporate governance* sebagai variabel independennya. Dengan menambah dan memperbesar jumlah sampel periode penelitian yaitu periode 2016 sampai dengan 2018 diharapkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat menutupi keterbatasan penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan jumlah sampel yang terbatas. Penelitian ini menggunakan perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan perusahaan multinasional didasari atas pertimbangan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengidentifikasi ribuan investasi asing yang ditengarai melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Di Perusahaan Multinasional Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* di perusahaan multinasional di Indonesia?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* di perusahaan multinasional di Indonesia?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* di perusahaan multinasional di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* di perusahaan multinasional di Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* di perusahaan multinasional di Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* di perusahaan multinasional di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain bagi:

1. Akademisi

Hasil penelitian akan memberikan bukti empiris atas pengaruh Struktur *Corporate Governance* Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*, sehingga diharapkan memberikan dorongan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik dan melengkapi penelitian yang telah ada.

2. Praktisi

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis, terutama dalam manajemen pajaknya.

3. Regulator

Dari penelitian ini diharapkan agar Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pengawas Pasar Modal dapat menelaah kebijakan yang berlaku saat ini dengan membuat peraturan yang jelas mengenai perpajakan di Indonesia, sehingga mempersempit celah perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, baik secara legal maupun ilegal.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis. Adapun masing-masing bab secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini memberikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka

Dalam bab ini membahas dan menjabarkan tentang teori-teori yang relevan dan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu dan riset-riset terkait dengan judul penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang pendekatan penelitian yang meliputi desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukurannya serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini menyajikan proses penganalisaan data yang meliputi prosedur pemilihan sampel, pengujian asumsi klasik, analisis data dan pembahasan.

BAB V: Penutup

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan rekomendasi penelitian serta saran-saran yang diperlukan untuk disampaikan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Untuk memahami konsep *corporate governance* maka digunakanlah dasar perspektif hubungan keagenan. Eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama kali dinyatakan oleh Jensen and Meckling (1976) menyebutkan manajer suatu perusahaan sebagai “agen” dan pemegang saham “principal”. Pemegang saham yang merupakan principal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham.

Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti ini bahwa adalah agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik principal. Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan principal dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadi, hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka panjang.

Teori keagenan (*agency theory*) menyatakan adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemegang saham (principal) karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Kurniasih, 2015).

2.1.2 *Corporate Governance*

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu struktur hubungan yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab diantara pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer yang dibentuk untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai tujuan utama suatu perusahaan. Sedangkan menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), *corporate governance* adalah proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

a. **Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance***

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yang meliputi lima prinsip, yaitu sebagai berikut:

- 1) Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- 2) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- 3) Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- 4) Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- 5) Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Implementasi *corporate governance* pada level perusahaan akan membuat perusahaan menjadi lebih transparan dalam pengungkapan informasi, sehingga kualitas laporan keuangannya menjadi lebih baik. Semakin baik lingkungan hukum suatu negara, maka tuntutan untuk menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance* akan semakin tinggi, sehingga hubungan antara implementasi *corporate governance* dengan kualitas laporan keuangannya lebih kuat. Namun, di sisi lain terdapat pandangan yang menyatakan bahwa *corporate governance* lebih penting di

negara yang memiliki sistem hukum yang lemah karena dalam negara yang memiliki sistem hukum yang lemah dimana perusahaan tidak dapat mengandalkan hukum negaranya, maka perusahaan akan melakukan mekanisme *corporate governance* yang lebih baik sebagai substitusinya (Klapper dan Love, 2004).

b. Struktur *Corporate Governance*

Suatu struktur *corporate governance* merupakan suatu susunan organ di dalam perusahaan yang menjalankan fungsi tata kelola sebagai pihak pengawas dan pihak yang menjalankan perusahaan. Adapun struktur *corporate governance* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Struktur *Corporate Governance*

1.	Komite Audit
2.	Kualitas Audit
3.	Kepemilikan Manajerial

2.1.3 Komite Audit

Pengertian Komite Audit menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Tugas dan fungsi

komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan.

Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui (Fadhilah, 2014):

1. Pengawasan proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal.
2. Penggunaan prinsip akuntansi berterima umum.
3. Mengawasi proses audit secara keseluruhan.

Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaah terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan. Komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat, sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya (Winata, 2014).

Komite audit bertugas melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *corporate governance*. Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang dengan laporan keuangan perusahaan.

2.1.4 Kualitas Audit

Kualitas audit berupa transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat. Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari *good corporate governance*. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham.

Menurut Maharani (2014) kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Dewi (2014) menjelaskan bahwa KAP *The Big Four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan KAP *Non The Big Four* yang memiliki banyak pengetahuan tentang tata cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan. Praktik *tax avoidance* pada perusahaan dapat dihindari dengan cara menggunakan auditor yang berkualitas, seperti para auditor dari *The Big Four*. Dengan begitu audit yang dihasilkan berkualitas pula dan mendukung transparansi yang merupakan salah satu konsep *good corporate governance*.

Hal-hal yang berhubungan dengan kualitas audit antara lain (Deis dalam Eksandy 2017) memaparkan:

- a. Lamanya auditor, semakin lama maka semakin rendah kualitas auditnya.
- b. Jumlah klien, semakin banyak maka semakin baik kualitas auditnya.

- c. Kesehatan keuangan klien, makin sehat ada kecenderungan klien menekan auditor untuk mengikuti standar yang berlaku.
- d. Review dari pihak ketiga, kualitas audit semakin tinggi apabila di review oleh pihak ketiga.

2.1.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajemen dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adanya dirinya sendiri. Dalam teori keagenan menyatakan bahwa manajer dalam mengelola perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Dengan adanya tanggung jawab yang besar, tentu manajer menginginkan imbalan yang besar juga.

Kepemilikan manajerial merupakan persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan (Prasetyo, 2018). Arifani (2012) menegaskan bahwa struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai persentase saham biasa atau opsi saham yang dimiliki direktur dan karyawan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung akan lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terdapat keputusan yang salah, manajemen juga yang akan menanggung konsekuensinya.

2.1.6 *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan upaya untuk meminimalisasi pembayaran pajak yang tidak jarang dilakukan oleh perusahaan karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016), *tax avoidance* adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. *Tax avoidance* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam konsep manajemen pajak.

Wajib pajak menginginkan penurunan pajak, sedangkan negara memiliki target tertentu dalam penerimaan pajak. Hal ini diperbolehkan secara aturan perpajakan atau bersifat legal (*acceptable tax avoidance*). Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dilakukan secara ilegal oleh wajib pajak dan tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Wajib pajak akan melakukan strategi dan cara yang legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dapat memanfaatkan hal-hal yang bersifat ambigu atau masuk dalam kriteria *grey area*. Strategi ini termasuk wilayah penghematan pajak yang dilakukan secara agresif oleh wajib pajak.

Menurut Lim (2011) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Tindakan *tax avoidance* akan mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam APBN. Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan sedemikian rupa agar mencapai target yang diinginkan sesuai dengan APBN.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menurut Suandy (2014) menyebutkan bahwa ada tiga karakter dalam *tax avoidance*. Adapun tiga karakter dalam *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

1. Adanya unsur artificial dimana berbagai peraturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan mungkin.

Model estimasi pengukuran *tax avoidance* yaitu menggunakan proxy tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif perusahaan atau *Effective Tax Rate* (ETR) dihitung dari total beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak (Zulaikha, 2014). Semakin rendah nilai ETR, maka semakin disinyalir bahwa perusahaan melakukan *tax avoidance*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *tax avoidance* terus berkembang saat ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi penelitian ini dalam Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Prasetyo (2018).	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	<i>Tax avoidance</i> , kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen.	Sampel penelitian berjumlah 51 perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) selama tahun 2011-2014. Metode penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dengan melakukan studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> dari hasil uji t diperoleh dengan <i>p-value</i> $(0,744) > (0,05)$.
2.	Eksandy (2017).	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014).	<i>Tax avoidance</i> , komite audit, kualitas audit dan komisaris independen.	Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI) sektor industri barang konsumsi periode 2010-2014 dan ada 14 perusahaan yang memenuhi kriteria. Metode dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dokumentasi perusahaan melalui situs resmi www.idx.co.id , kemudian mengakses laporan keuangan tahunannya dan mengumpulkan data - data yang dibutuhkan.	Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) dengan nilai signifikansi sebesar $0,058 < 0,05$. Kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) dengan nilai signifikansi sebesar $0,042 > 0,05$.

3.	Diantari (2016).	Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	<i>Tax avoidance</i> , komite audit, proporsi komisaris independen dan proporsi kepemilikan institusional.	Sampel penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 berjumlah 44 perusahaan. Metode penelitian ini data laporan tahunan perusahaan yang bersumber dari www.idx.co.id serta buku-buku dan jurnal yang terkait untuk dijadikan referensi penelitian.	Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> dengan tingkat signifikansi variabel sebesar $0,000 < 0,05$.
4.	Mahulae (2016).	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Komite Audit Terhadap <i>Tax Aoidance</i> (Studi Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014).	<i>Tax avoidance</i> , kepemilikan manajerial, komite audit dan kepemilikan institusional.	Terdapat 9 sampel perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan dokumentasi laporan keuangan tahunan selama tahun 2010-2014.	Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> sebesar $0,1693 > 0,05$. Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> sebesar $0,0183 < 0,05$.
5.	Pramudito (2015).	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	<i>Tax avoidance</i> , konservatisme akuntansi, kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris.	Sampel yang terpilih adalah 112 perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. Metode penelitian menggunakan teknik observasi yang didapat dari BEI dan mengunduhnya melalui <i>website</i> resmi BEI.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> sebesar $0,014 < 0,05$.

6.	Winata (2014).	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013.	<i>Tax avoidance</i> , kepemilikan institusional, persentase dewan komisaris independen, kualitas audit dan jumlah komite audit.	Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 sebanyak 234 perusahaan. Metode dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi berupa laporan keuangan yang diperoleh dari <i>website</i> BEI.	Kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> dengan signifikansi variabel sebesar $0,48 > 0,05$. Komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.
7.	Fadhilah (2014).	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei 2009-2011).	<i>Tax avoidance</i> , komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris.	Terdapat 55 perusahaan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2011. Penelitian ini menggunakan metode observasi yang diperoleh dari www.idx.co.id dan <i>website</i> perusahaan terkait.	Komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> dengan nilai signifikansi $0,939 > 0,05$.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Sekaran (2014) yaitu hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mungkin benar dan mungkin salah, sehingga dapat dianggap atau dipandang sebagai konklusi atau kesimpulan yang sifatnya sementara, sedangkan penolakan atau penerimaan suatu hipotesis tersebut tergantung dari hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang dikumpulkan, kemudian diambil suatu kesimpulan.

2.3.1 Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*

Komite audit adalah bagian sebuah perusahaan yang bertugas mengontrol dan mengawasi kinerja manajemen. Komite audit erat kaitannya dengan penelaah terhadap resiko yang dihadapi perusahaan dan juga ketaatan terhadap peraturan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 Pasal 4 Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Menurut Diantari (2016), komite audit berfungsi dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Selain itu, fungsi komite audit juga memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan.

Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *corporate governance* (Andriyani dalam Eksandy 2017).

Berdasarkan teori keagenan dijelaskan bahwa semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan *tax avoidance* dapat diminimalisasi. Komite audit membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen terhadap pengendalian yang telah berjalan, sehingga dapat mencegah asimetri informasi. Dewi dan Jati (2014), perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan selalu mengawasi segala kegiatan di dalam perusahaan. Komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat, sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya (Winata, 2014).

Fadhilah (2014) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) yang menyatakan bahwa komite audit komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* di Perusahaan Multinasional di Indonesia.

2.3.2 Pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*

Dalam implementasi *corporate governance*, kualitas audit dengan pengungkapan yang transparan (*transparency*) menjadi salah satu elemen yang penting (Sandy dan Lukviarman, 2015). Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP. Mulyani (2018) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik dan akan semakin sulit melakukan kebijakan *tax avoidance*.

Jika dikaitkan dengan teori keagenan, bahwa seorang auditor dengan kualitas audit yang tinggi akan memiliki kemampuan dalam mendeteksi adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan lebih mementingkan kecilnya biaya dengan keuntungan yang didapatkan perusahaan tinggi, sehingga manajemen perusahaan cenderung tidak melakukan *tax avoidance*. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor diharapkan dapat dipercaya dan digunakan oleh pihak pemegang saham (*principal*). Khoiriyah (2019) menyatakan bahwa auditor yang memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi pula. Semakin baik kualitas audit perusahaan, maka menunjukkan bahwa perusahaan sudah berjalan dengan baik.

Dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi, hal yang menjadi pertimbangan adalah informasi yang diberikan dari laporan keuangan yang telah diaudit. Semakin baik kualitas auditnya semakin baik pula informasi

yang diberikan. Informasi yang dilihat dapat menilai apakah laporan tersebut berkualitas atau tidak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chai dan Liu (2010) dinyatakan bahwa jika nominal pajak yang dibayar terlalu tinggi, biasanya akan memaksa perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak, maka semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan *tax avoidance* untuk kepentingan perpajakan.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Eksandy (2017) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* di Perusahaan Multinasional di Indonesia.

2.3.3 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan. Mahulae (2016) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajerial, maka akan semakin baik kinerja perusahaan, dikarenakan hal tersebut membantu menyatukan kepentingan pemegang saham dan manajer. Peningkatan persentase kepemilikan tersebut membuat manajer termotivasi untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Manajer akan berhati-hati dalam mengambil keputusan karena akan berimbas pada manajer itu sendiri, sehingga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil keputusan yang tepat untuk kesejahteraan perusahaan.

Teori keagenan menyatakan bahwa manajer dalam mengelola perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar. Manajer harus dapat mengoptimalkan profit perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Dengan adanya tanggung jawab yang besar, tentu manajer menginginkan imbalan yang besar juga. Prasetyo (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan profit bagi pemilik perusahaan (*principle*) dan kepentingan untuk mendapatkan imbalan yang besar bagi manajer (*agent*).

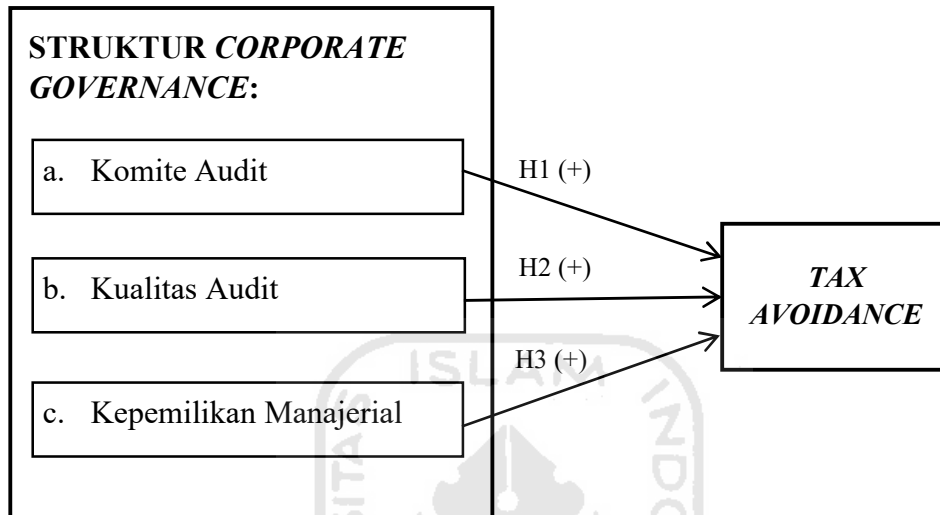
Dalam perusahaan biasanya manajer atau kepemilikan manajerial membangun hubungan baik dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Dengan adanya kepemilikan manajerial akan cenderung menjaga reputasi, citra dan etika perusahaan, sehingga dengan adanya kepemilikan manajerial dapat menekan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini berdampak positif dengan alasan manajer akan patuh dalam membayar pajak dimana manajer cenderung tidak melakukan *tax avoidance* (Boussaidi & Hamed, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Ma dan Thomas (2019), Zahirah, 2017, Pramudito dan Sari (2015), Anuar dkk (2014) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* di Perusahaan Multinasional di Indonesia.

2.4 Kerangka Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka serta beberapa penelitian terdahulu, maka secara ringkas kerangka penelitian ini dapat dilihat dari bagan alir yang disajikan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4

Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena untuk menganalisis data secara mendalam dan memahami makna dari pengaruh struktur *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2016) yang menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan hasilnya.

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2016) mendefinisikan populasi adalah sebagai berikut: “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dari penelitian ini adalah semua perusahaan multinasional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2016) mendefinisikan sampel adalah sebagai berikut: “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang

konsisten atau yang masuk dalam kelompok perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI dan memenuhi kriteria tertentu.

Kriteria-kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

Sampel yang digunakan *annual report* tahun 2016-2018 dikarenakan penelitian ini dimulai pada tahun 2019, sehingga *annual report* perusahaan multinasional pada tahun 2019 belum dirilis.

- b. Perusahaan multinasional yang tidak menyampaikan data secara lengkap yang berhubungan dengan variabel penelitian.
- c. Perusahaan sampel dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan 20% atau lebih. Hal ini sesuai dengan PSAK No.15 yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih.
- d. Perusahaan multinasional yang melakukan *delisting* dari BEI.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data sekunder seperti *annual report* pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian selama tahun 2016-2018 melalui situs BEI yaitu www.idx.co.id.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2015).

3.3.2. Sumber Data

Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh untuk penelitian ini bersumber dari laporan tahunan Perusahaan Multinasional di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda (Sekaran, 2014). Berdasarkan telaah pustaka dan perumusan hipotesis, maka variabel dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas adalah variabel yang mengambil variabel terikat, baik secara positif maupun secara negatif. Jika terdapat variabel bebas, variabel terikat pun akan hadir dan dengan setiap unit kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam variabel terikat (Sekaran,

2014). Dalam penelitian ini variabel bebas yang diteliti adalah komite audit, kualitas audit dan kepemilikan manajerial.

b. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2014). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikatnya adalah tindakan *tax avoidance*.

3.4.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

a. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Dimensi yang dapat diukur dari komite audit adalah banyaknya jumlah anggota komite audit di perusahaan.

b. Kualitas Audit

Pengukuran kualitas audit berdasarkan besar kecilnya ukuran KAP yang melakukan audit pada suatu perusahaan. KAP yang tergolong *Big Four* (Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG International Cooperative, Ernst & Young) memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan *non-Big Four* (Sari, 2016). Variabel ini diukur dengan menggunakan *variable dummy* sebagai berikut:

Kategori 1= Kantor akuntan publik yang tergolong ke dalam kantor akuntan publik *Big Four*.

Kategori 0= Kantor akuntan publik *non-Big Four*.

c. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat di dalam pengambilan keputusan. Semakin tinggi proporsi saham yang dimiliki oleh manajerial, maka semakin baik kinerja perusahaan, dikarenakan hal itu membantu menyatukan kepentingan antara pemegang saham dan manajer (Zahirah, 2017).

Kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan menggunakan rasio:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Total Saham Manajer}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

d. Tax Avoidance

Tax avoidance adalah penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau aturan lain yang berlaku. Pengukuran variabel *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan pengukuran dari Prasetyo (2018).

Variabel *tax avoidance* penelitian ini diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu perbandingan antara beban pajak dengan laba sebelum pajak.

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik dengan bantuan program *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 21.0. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Berikut adalah beberapa langkah dalam menganalisis, yaitu:

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum untuk masing-masing variabel (Ghozali, 2016).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah (tidak terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diuji melalui uji asumsi klasik, yaitu:

a. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal. Pengujian normalitas adalah dengan uji statistik *one-simple kolmogorov-smirnov*. Dasar pengambilan keputusan dari *one-simple kolmogorov-smirnov* adalah:

1. Jika hasil *one-simple kolmogorov-smirnov* di atas tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.

2. Jika hasil *one-simple kolmogorov-smirnov* di bawah tingkat signifikansi 0,05 tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Cara mengetahui ada tidaknya multikolinieritas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai dari VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Bila nilai VIF < 10 dan *tolerance* > 0,10, maka model regresi yang digunakan terbebas dari masalah multikolinieritas (Ghozali, 2016).

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi yaitu suatu keadaan dimana terjadi korelasi antara residual tahun ini dengan tingkat kesalahan tahun sebelumnya. Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengkaji apakah suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1). Jika terjadi korelasi maka dinamakan penyakit autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari autokorelasi (Ghozali, 2016).

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi yaitu dengan cara menggunakan uji Durbin Watson (DW). Uji ini digunakan dengan cara

membandingkan nilai Durbin Watson dengan table Durbin Watson. Dalam table Durbin Watson terdapat nilai batas atas (upper bound atau d_U) dan nilai batas bawah (lower bound atau d_L). Menurut (Ghozali, 2016), adapun kriteria yang diberlakukan untuk menjadi patokan adalah sebagai berikut:

Setelah itu membandingkan nilai statistik d dengan d_L (d Lower) dan d_U (d Upper) dari tabel sesuai ketentuan berikut:

- a. Bila $d < d_L$, berarti ada korelasi yang positif
- b. Bila $d_L \leq d \leq d_U$, berarti tidak dapat di ambil kesimpulan apa-apa
- c. Bila $d_U \leq d \leq 4 - d_U$, berarti ada korelasi yang positif maupun negatif
- d. Bila $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$, berarti tidak dapat di ambil kesimpulan apa-apa
- e. Bila $d > 4 - d_L$, berarti ada korelasi yang negatif.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dan residual tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik *scatterplot*, yaitu titik yang menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Pengujian yang lebih valid dapat dilakukan dengan meregresikan nilai *absolute* residual dengan variabel independennya atau disebut uji *glejser*. Uji heteroskedastisitas dilihat dari nilai signifikansi dimana jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.5.3 Uji Hipotesis Penelitian

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linear berganda dengan program aplikasi SPSS 21.0. Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen yaitu komite audit, kualitas audit dan kepemilikan manajerial terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

Adapun model regresi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = *Tax Avoidance*

α_0 = Bilangan Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi Variabel Komite Audit

β_2 = Koefisien Regresi Variabel Kualitas Audit

β_3 = Koefisien Regresi Variabel Kepemilikan Manajerial

X_1 = Komite Audit

X_2 = Kualitas Audit

X_3 = Kepemilikan Manajerial

e = *Standard Error*

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit* secara statistik ketepatan fungsi tersebut dapat diukur dari nilai statistik F, nilai statistik T dan nilai koefisien determinasi. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistik berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak), sebaliknya

disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima, (Ghozali, 2016).

a. Koefisien Determinan (*Adjusted R²*)

Koefisien determinan bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, untuk jumlah variabel independen lebih dari dua, lebih baik menggunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan (*Adjusted R²*) (Ghozali, 2016).

b. Uji F

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016):

- 1) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_a ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

c. Uji t

Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2016). Untuk mendeteksi uji tersebut yaitu dengan melihat p-value dari hasil uji parameter individual (uji statistik t) dengan menggunakan derajat kepercayaan sebesar 95%, sedangkan tingkat kesalahan (α) yang ditoleransi sebesar 5%. P-value sebesar $< 0,05$ dengan $\alpha = 5\%$, maka model yang diuji akan berpengaruh signifikan antar variabel-variabel tersebut.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data *time series* yang terhimpun dalam laporan keuangan tahunan oleh perusahaan multinasional yang terdaftar dalam BEI tahun 2016-2018.

4.1.1 Seleksi Sampel

Proses pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, metode ini digunakan agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam bab sebelumnya. Proses perhitungan sampel dijelaskan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Ringkasan Prosedur Pengambilan Sampel

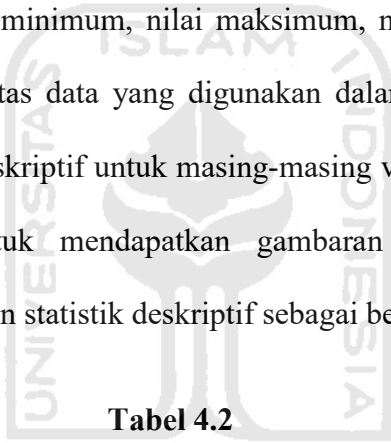
No.	Kriteria Penentuan Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018.	174
2.	Perusahaan multinasional yang menyampaikan data tidak secara lengkap berhubungan dengan variabel penelitian.	(6)
3.	Perusahaan sampel dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan 20% atau lebih.	(78)
4.	Perusahaan multinasional yang melakukan <i>delisting</i> dari Bursa Efek Indonesia (BEI).	0
	Jumlah data yang dapat digunakan sebagai sampel	90

Sumber: Data IDX Statistics

Berdasarkan Tabel 4.1 selama periode 2016-2018 terdapat 174 perusahaan multinasional. Setelah dilakukan *purposive sampling*, jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria ada 30 perusahaan. Perusahaan tersebut tersedia selama 3 (tiga) tahun jadi jumlah total perusahaan yang dijadikan sampel untuk diolah adalah sebanyak 90 perusahaan.

4.1.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk melihat distribusi data yang digunakan sebagai sampel. Statistik deskriptif menggambarkan distribusi data yang terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean / rata-rata dan nilai standar deviasi atas data yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut merupakan statistik deskriptif untuk masing-masing variabel pada tahun 2016-2018. Dilakukan untuk mendapatkan gambaran sebaran data variabel penelitian menggunakan statistik deskriptif sebagai berikut:



Tabel 4.2

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komite Audit	90	3.00	5.00	3.1667	.45592
Kualitas Audit	90	.00	1.00	.7333	.44469
Kepemilikan Manajerial	90	.00	.07	.0056	.01526
Tax Avoidance	90	.03	2.36	.3439	.33474
Valid n (listwise)	90				

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2020

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa sampel data setiap variabel dalam penelitian ini sebanyak 90 perusahaan, nilai *tax avoidance* untuk perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI periode 2016-2018 memiliki nilai terendah sebesar 0,03 sedangkan nilai terbesar *tax avoidance* yaitu sebesar 2,36. Dengan mean *tax avoidance* setiap perusahaan sebesar 0,3439. Nilai standar deviasi untuk *tax avoidance* adalah 0,33474, nilai standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan dengan mean tersebut menunjukkan bahwa variabel *tax avoidance* memiliki data yang tidak bervariasi.

Nilai komite audit untuk perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI periode 2016-2018 memiliki nilai terendah sebesar 3,00, sedangkan nilai terbesar komite audit yaitu sebesar 5,00. Dengan mean komite audit setiap perusahaan sebesar 3,1667. Nilai standar deviasi untuk komite audit adalah 0,45592, nilai standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan dengan mean tersebut menunjukkan bahwa variabel komite audit memiliki data yang tidak bervariasi.

Nilai kualitas audit untuk perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI periode 2016-2018 memiliki nilai terendah sebesar 0,00, sedangkan nilai terbesar kualitas audit yaitu sebesar 1,00. Dengan mean kualitas audit setiap perusahaan sebesar 0,7333. Nilai standar deviasi untuk kualitas audit adalah 0,44469, nilai standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan dengan mean tersebut menunjukkan bahwa variabel kualitas audit memiliki data yang tidak bervariasi.

Nilai kepemilikan manajerial untuk perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI periode 2016-2018 memiliki nilai terendah sebesar 0,00, sedangkan nilai terbesar kepemilikan manajerial yaitu sebesar 0,07. Dengan mean kepemilikan manajerial setiap perusahaan sebesar 0,0056. Nilai standar deviasi untuk kepemilikan manajerial adalah 0,01526, nilai standar deviasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mean tersebut menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki data yang bervariasi.

4.2. Pengujian Asumsi Klasik

Penelitian ini telah memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri dari: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Untuk memenuhi syarat uji asumsi klasik dilakukan proses transformasi.

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka uji statistik yang dapat dilakukan yaitu pengujian *one sample kolmogorov-smirnov*. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.1222222
	Std. Deviation	.39544168
Most Extreme Differences	Absolute	.116
	Positive	.116
	Negative	-.072
Kolmogorov-Smirnov Z		1.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.174

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2020

Berdasarkan uji statistik dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik menggunakan nilai *Kolmogorov-smirnov*. Dapat dilihat signifikansi nilai *Kolmogorov-smirnov* yang diatas tingkat kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,174, hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel tidak ortogonal. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari multikolinieritas. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10. Berdasarkan hasil pengolahan data *variance inflation* menunjukkan bahwa nilai VIF < 10, sehingga dikategorikan bebas multikolinieritas artinya variabel-variabel dependen ortogonal.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keputusan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
Komite Audit	.927	1.079	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Kualitas Audit	.929	1.076	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Kepemilikan Manajerial	.971	1.030	Tidak Terjadi Multikolinieritas

a. Dependent Variable: Tax Avoidance
Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2020

Berdasarkan nilai Tolerance dan VIF seperti terlihat pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa tidak ada nilai Tolerance kurang dari 0,10, dan nilai VIF tidak ada yang lebih besar dari 10. Hal ini berarti bahwa ketiga variabel independen tersebut tidak terjadi hubungan multikolinieritas dan dapat digunakan untuk memprediksi variabel *tax avoidance*.

4.2.3 Uji Autokorelasi

Untuk menguji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson (DW). Dalam tabel 4.5 dibawah ini menunjukkan hasil dari uji autokorelasi sebagai berikut:

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.340 ^a	.115	.085	.64998	1.842

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Manajerial, Kualitas Audit, Komite Audit

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2020

Dari uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,842. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson dengan menggunakan tingkat signifikansi ($\alpha=5\%$), jumlah variabel independen ($k=3$) dan jumlah data sampel ($n=90$). Diperoleh nilai $dL=1,5889$ dan $dU=1,7264$. Oleh karena nilai DW 1,842 sehingga nilai $4-dL$ (2,4111) dan $4-dU$ (2,2736), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi. Nilai $dU < DW < (4-dU)$ atau $1,7264 < 1,842 < 2,2736$, sehingga model regresi penelitian dapat diterima dan layak digunakan.

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dapat menggunakan uji glejser yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji glejser dapat dilihat tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a			
Model	t	Signifikansi	Keterangan
(Constant)	-.010	.992	Homokedastisitas
1 Komite Audit	1.516	.133	Homokedastisitas
Kualitas Audit	-1.149	.254	Homokedastisitas
KepemilikanManajerial	1.375	.173	Homokedastisitas

a. Dependent Variable: abs_res
Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2020

Data dikatakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas apabila memiliki nilai sig > 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas diketahui bahwa nilai sig > 0,05. Kesimpulannya data dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

4.3. Pengujian Hipotesis

4.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (*explanatory*) terhadap satu variabel dependen. Selanjutnya untuk mendukung hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji T, uji F dan koefisien determinasi.

Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS *for Windows* 21.0. Adapun ringkasan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2.710	.672		-4.030	.000
1 Komite Audit	1.106	.552	.211	2.003	.048
Kualitas Audit	.446	.195	.240	2.279	.025
Kepemilikan Manajerial	8.010	4.234	.195	1.892	.062

a. Dependent Variable: Tax Avoidance
 Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2020

Dari tabel 4.7 maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = -2,710 + 1,106X_1 + 0,446X_2 + 8,010X_3$$

Dari model diatas diketahui:

1. Nilai konstanta (a) sebesar -2,710 artinya, *tax avoidance* akan bernilai sebesar -2,710 apabila seluruh variabel independen dianggap bernilai nol.

2. Nilai koefisien regresi X_1 (b_1) sebesar 1,106, artinya komite audit memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* sebesar 1,106. Apabila komite audit mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 1,106. Begitu juga sebaliknya, apabila komite audit mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka *tax avoidance* akan mengalami peningkatan sebesar 1,106.
3. Nilai koefisien regresi X_1 (b_1) sebesar 1,106, artinya komite audit memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* sebesar 1,106. Apabila komite audit mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 1,106. Begitu juga sebaliknya, apabila komite audit mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka *tax avoidance* akan mengalami peningkatan sebesar 1,106.
4. Nilai koefisien regresi X_1 (b_1) sebesar 1,106, artinya komite audit memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* sebesar 1,106. Apabila komite audit mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 1,106. Begitu juga sebaliknya, apabila komite audit mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka *tax avoidance* akan mengalami peningkatan sebesar 1,106.

4.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pada model regresi berganda penggunaan *Adjusted R²* atau koefisien determinasi yang telah disesuaikan akan lebih baik dalam melihat seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen bila dibandingkan dengan R^2 .

Tabel 4.8

Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.340 ^a	.115	.085	.64998

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Manajerial, Kualitas Audit, Komite Audit

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2020

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0,085. Angka ini menunjukkan bahwa 8,5% variasi variabel dependen (*tax avoidance*) dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen (komite audit, kualitas audit dan kepemilikan manajerial) yang diteliti oleh penelitian ini.

Sedangkan sisanya sebesar 91,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian dan mungkin dapat mempengaruhi *tax avoidance* di perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018.

4.3.3 Uji F

Pengujian signifikan bertujuan untuk mengetahui signifikansi korelasi Komite Audit (X1), Kualitas Audit (X2) dan Kepemilikan Manajerial (X3) secara bersama-sama terhadap *Tax Avoidance* (Y). Uji signifikansi dilakukan dengan menggunakan Uji F.

Tabel 4.9

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4.740	3	1.580	3.740	.014 ^b
1 Residual	36.333	86	.422		
Total	41.072	89			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial,

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2020

Pengujian signifikan bertujuan untuk mengetahui signifikansi korelasi Komite Audit, Kualitas Audit dan Kepemilikan Manajerial secara bersama-sama terhadap *Tax Avoidance*. Uji signifikansi dilakukan dengan menggunakan uji F. Berdasarkan hasil uji diperoleh nilai tingkat signifikansi F sebesar 0,014^b lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya berarti bahwa secara simultan Komite Audit, Kualitas Audit dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

4.3.4 Uji T

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual mampu memerankan variasi variabel dependen. Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H_1 , H_2 , dan H_3) yang diajukan dapat ditunjukkan pada tabel 4.10.

Tabel 4.10

Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2.710	.672		-4.030	.000
1 Komite Audit	1.106	.552	.211	2.003	.048
Kualitas Audit	.446	.195	.240	2.279	.025
Kepemilikan Manajerial	8.010	4.234	.195	1.892	.062

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2020

- 1) Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* (H_1)

Hasil uji t untuk H^1 diperoleh nilai signifikansi di atas 0,05 yaitu 0,048 dan memiliki arah koefisien positif sebesar 1,106. Artinya H^1 diterima karena hasil uji t menunjukkan arah positif dan signifikan.

- 2) Kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pajak (H_2)

Hasil uji t untuk H^2 diperoleh nilai signifikansi di atas 0,05 yaitu 0,025 dan memiliki arah koefisien positif sebesar 0,446. Artinya H^2 diterima karena hasil uji t menunjukkan arah positif dan signifikan.

- 3) Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* (H_3)

Hasil uji t untuk H^3 diperoleh nilai signifikansi di atas 0,05 yaitu 0,062 dan memiliki arah koefisien positif sebesar 8,010. Artinya, H^3 ditolak karena hasil uji t menunjukkan arah positif dan tidak signifikan.

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis pertama (H^1) penelitian ini menemukan bahwa variabel komite audit memiliki *p-value* sebesar 0,048. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Artinya semakin banyak jumlah komite audit, maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah. Hal ini sesuai dengan teori keagenan, dimana terdapat peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara investor, kreditor, karyawan, pengelola perusahaan, dan pemegang kepentingan lainnya di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Komite audit yang dibentuk perusahaan ini digunakan untuk meminimalisir masalah keagenan (antara wajib pajak dengan pemerintah) di dalam suatu perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, kemungkinan sejak direkomendasikan *corporate governance* di BEI komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dalam cara yang dapat menghindari resiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk *tax avoidance* (Puspita, 2014).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Winata (2014) dan Fadhilah (2014) yang membuktikan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin banyaknya jumlah komite audit yang ada pada sebuah perusahaan dapat membuat keputusan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dapat diminimalisir. Akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017), Mahulae (2016) dan Diantari (2016) yang menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil ini dikarenakan keberadaan komite audit di suatu perusahaan berfungsi untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan tidak berjalan dengan baik dikarenakan tidak mendapatkan dukungan dari seluruh elemen perusahaan.

2. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis kedua (H^2) penelitian ini menemukan bahwa variabel kualitas audit memiliki *p-value* sebesar 0,025. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Artinya, semakin tinggi kualitas audit yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* dapat menghasilkan kualitas audit yang semakin baik dan akan semakin sulit melakukan kebijakan *tax avoidance*. Dengan demikian, perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan *tax avoidance*, karena auditor yang termasuk dalam *The Big Four*

lebih kompeten dan profesional dibandingkan *Non The Big Four*, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan (Dewi dan I Ketut, 2014). Sebaliknya, semakin rendah kualitas audit maka dapat meningkatkan praktik *tax avoidance*.

Teori keagenan menjelaskan bahwa seorang auditor dengan kualitas audit yang tinggi akan memiliki kemampuan dalam mendeteksi adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*, kemungkinan karena Perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memang akan lebih cenderung dipercayai oleh fiskus karena KAP tersebut memiliki reputasi yang baik dan memiliki integritas yang tinggi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eksandy (2017) yang membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Audit laporan keuangan tersebut bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan yang diterbitkan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau prinsip akuntansi berterima umum, sehingga sampai mengukur ada tidaknya tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini berbeda dari penelitian Winata (2014) dan Fadhilah (2014) yang menemukan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perbedaan ini dikarenakan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang di audit KAP *The Big Four* maupun KAP *non The Big Four* terhadap penanggulangan praktik *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan ketika KAP mengaudit suatu laporan keuangan berpedoman pada

standart pengendalian mutu kualitas audit telah ditetapkan oleh Dewan Standard Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan aturan etika akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI, sehingga pelaksanaannya sudah didasarkan pada aturan yang ada.

3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H^3) penelitian ini menemukan bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki *p-value* sebesar 0,062. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Artinya, semakin kecil proporsi kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung tidak memperhatikan untuk kepentingan pemegang saham. Hal ini memungkinkan bahwa pihak manajerial tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang yang besar dalam menentukan kebijakan pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Prasetyo (2018) dan Mahulae (2016) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan manajerial tidak mempunyai hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kewenangan yang besar dalam perusahaan. Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian Pramudito (2015) yang mengatakan bahwa kepemilikan manajerial

mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil penelitian ini dengan Pramudito (2015) karena semakin banyak kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* akan semakin meningkat. Manajerial perusahaan lebih mengutamakan profit perusahaan, sehingga manajerial perusahaan akan mempengaruhi keputusan-keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melakukan *tax avoidance* demi meningkatkan profit perusahaan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin banyak jumlah komite audit, maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Winata (2014) dan Fadhilah (2014) yang membuktikan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
2. Kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi tingkat kualitas audit yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* dapat menghasilkan kualitas audit yang semakin baik dan akan semakin sulit melakukan kebijakan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eksandy (2017) yang membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin kecil proporsi kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung tidak memperhatikan untuk kepentingan pemegang saham. Hasil penelitian ini mendukung penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Prasetyo (2018) dan Mahulae (2016) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

4. Komite audit, kualitas audit dan kepemilikan manajerial secara simultan (bersama-sama) berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* di perusahaan multinasional di Indonesia.

5.2. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan, maka terdapat beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga bermanfaat bagi perusahaan dalam menganalisis masalah keagenan antara wajib pajak dengan pemerintah. Didukung dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 Pasal 4 Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan demikian adanya KAP *The Big Four* memiliki kualitas audit yang tinggi untuk mendeteksi adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eksandy (2017) yang membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kewenangan terhadap besarnya pajak diperusahaan. Dengan demikian diharapkan manajer meningkatkan profit yang tinggi dan mengembangkan perusahaan, sehingga manajer memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terkait dengan pajak dalam perusahaan.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, serta kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat disampaikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lainnya, seperti kepemilikan institusional, karakter eksekutif, karakter perusahaan, dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan lain-lain. Menambah periode penelitian sehingga hasil penelitian lebih bisa dibandingkan dengan penelitian terdahulu.
2. Perusahaan-perusahaan *go public* supaya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan manajemen pajak yang digunakan dalam perusahaan agar terhindar dari sanksi administrasi pajak.
3. Hendaknya Direktorat Jenderal Pajak mempublis laporan pembayaran pajak perusahaan dan memperbaiki peraturan pajak, sehingga mempersempit celah untuk dilakukan *tax avoidance* baik secara legal maupun ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

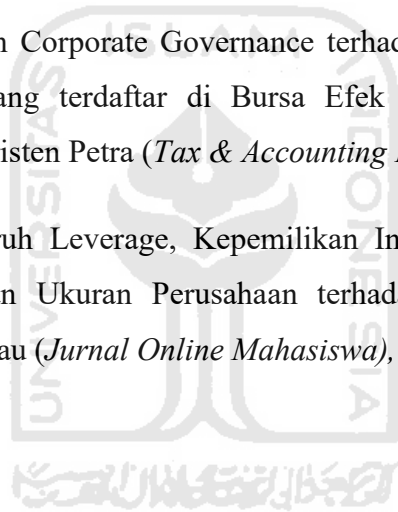
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boussaidi, A., & Hamed, M. (2015). The Impact Of Governance Mechanisms On Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From Tunisian Context. (*Journal Of Asian Business Strategy*), 5: 01-12.
- Cahyono, D. D, Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013. Universitas Pandanaran (*Journal Of Accounting*), 2 (2).
- Chai, H. D. (2010). *Competition and Corporate Tax Avoidance. Evidence from Chinese Industrial Firms.*, www.ssrn.com.
- Charisma, R. B (2019), Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. Universitas Trisakti (*Prosiding Seminar Nasional*).
- CNBC Indonesia. (2019). *Disebut Terlibat Transfer Pricing Adaro, Siapa Coaltrade?* Diakses pada 18 Oktober 2019 dari <https://www.cnbcindonesia.com>
- Cooper, D. R. (2014). *Business research methods*. New York: McGraw-Hill Education.
- Dewi, K. D. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. Universitas Udayana (*E-Jurnal Akuntansi*), 6 (2).
- Diantari, P. R. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. Universitas Udayana (*E-Journal Akuntansi*), 16 (1).

- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 - 2014). Universitas Muhammadiyah Tangerang (*Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*), 1 (1).
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2009-2011). Universitas Negeri Padang (*Jurnal Akuntansi*), 2 (1).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, M. I. (2015). *Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976), Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure, University of Rochester (*Journal of Financial Economics*), 3 (4), pp. 305-360.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Buku Informasi APBN 2019. <https://www.kemenkeu.go.id/media/11226/buku-informasi-apbn-2019.pdf> (diakses pada 20 Januari 2020)
- Khoiriyah, J. D. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Return On Assets terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Universitas Sriwijaya (*Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*), 13 (2).
- Kurniasih, T., & Maria M. R. S. (2015). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. Universitas Udayana (*Buletin Studi Ekonomi*), 18.(1).

- Mahulae, E. E. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Otomotif yang terdaftar di BEI Periode 2010-2014). Universitas Telkom (*E-Proceeding of Management*), 3 (2).
- Ma Mark, Wayne B. Thomas. (2019). *Legal Environment and Corporate Tax Avoidance: Evidence from State Tax Codes*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Meiza, R. (2015). Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance dan Defereed Tax Expense terhadap Tax Avoidance. Universitas Negeri Padang (*Jurnal Akuntansi*), 3 (1).
- Mulyadi, M. (2016). *Metode Penelitian Praktis Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: Publica Press.
- Mulyani, S. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI). Universitas Batik Surakarta (*Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*), 3 (1).
- Nugraheni, A. S., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. Universitas Telkom (*Jurnal Akuntansi*), 2227-2234.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Peraturan Kementrian Badan Usaha Milik Negara. (2011). *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara*.

- Pramudito, B. W. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Tax Avoidance. Universitas Udayana (*E-Jurnal Akuntansi*), 13 (3), pp. 705-722.
- Prasetyo I., & Pramuka, A. B. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. Universitas Jenderal Soedirman (*Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*), 20 (2).
- Puspita, S. R., & Harto. P (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Universitas Diponegoro (*Journal Of Accounting*), 3 (2), pp. 1-13.
- Putranti, T. M. (2015). *Studi Penghindaran Pajak Kegiatan Jasa Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Responsi Bank.
- Rusydi, M. K. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Aggressive Tax Avoidance di Indonesia. Universitas Brawijaya (*Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*), 4 (2), pp.165-329.
- Sandy, S., & Niki L. (2015). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. Universitas Islam Indonesia (*Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*), 19 (2).
- Santoso, T. (2014). Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Universitas Diponegoro (*Journal of Accounting*), 3 (4), pp. 1-37.
- Sari. (2016). Reputasi Auditor sebagai Pemoderasi Pengaruh Audit Fee pada Auditor Switching. Universitas Udayana (*E-Jurnal Akuntansi*), 16 (1), pp. 527–556.
- Sekaran. (2014). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Research Methods for Business)*. Buku 1 Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swingly, C., & Sukartha, M. I. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. Universitas Udayana (*E-Jurnal Akuntansi*), 10 (1), pp.47-62.
- Wijaya, I. (2012). Mengenal Penghindaran Pajak, Tax Avoidance. <http://www.pajakgo.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance>.
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. Universitas Kristen Petra (*Tax & Accounting Review*), 4 (1).
- Zahirah, A. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Universitas Riau (*Jurnal Online Mahasiswa*), 4 (1).



LAMPIRAN I
DATA PERUSAHAAN



Tabel I**Daftar Perusahaan Multinasional Terdaftar di BEI**

No	Perusahaan	Kode
1	PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk	AISA
2	PT AKR Corporindo Tbk.	AKRA
3	PT Asahimas Flat Glass Tbk.	AMFG
4	PT Astra Graphia Tbk.	ASGR
5	PT Astra International Tbk.	ASII
6	PT Astra Otoparts Tbk.	AUTO
7	PT Sepatu Bata Tbk.	BATA
8	PT Bumi Resources Tbk.	BUMI
9	PT Colorpak Indonesia Tbk.	CLPI
10	PT Charoend Pokhpand Tbk	CPIN
11	PT Delta Jakarta Tbk.	DLTA
12	PT Intiland Development Tbk.	DILD
13	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	DVLA
14	PT Eratex Djaya Tbk.	ERTX
15	PT Goodyear Indonesia Tbk	GDYR
16	PT Gudang Garam Tbk	GGRM
17	PT Hexindo Adiperkasa Tbk.	HEXA
18	PT HM Sampoerna Tbk.	HMSP
19	PT Indofood CBP Tbk	ICBP
20	PT Sumi Indo Kabel Tbk.	IKBI
21	PT Indomobil SuksesInternational Tbk	IMAS
22	PT International Nickel Indonesia Tbk.	INCO
23	PT Indofood Tbk.	INDF
24	PT Toba Pulp Lestari Tbk.	INRU
25	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	INTP
26	PT Japfaa Comfed Tbk.	JPFA
27	PT Kimia Farma Tbk	KAEF
28	PT Kalbe Farma Tbk	KLBF
29	PT Lion Metal Works Tbk.	LION
30	PT London Sumatra Indonesia Tbk.	LSIP
31	PT Medco Energi International Tbk.	MAIN
32	PT Malindo Feedmail Tbk	MEDC
33	PT Merck Tbk.	MERK
34	PT Multi Bintang Tbk.	MLBI
35	PT Mayora Indah Tbk	MYOR

No	Perusahaan	Kode
36	PT Petrosea Tbk.	PTRO
37	PT Pyridam Farma Tbk	PYFA
38	PT Rig Tenders Indonesia Tbk.	RIGS
39	PT Bentoel Investama Tbk	RMBA
40	PT Salim Ivomas Pratama Tbk	SIMP
41	PT Sierad Produce Tbk	SIPD
42	PT Sekal Laut Tbk	SKLT
43	PT Holcim Indonesia Tbk	SMBC
44	PT Semen Baturaja Tbk	SMBR
45	PT Semen Indonesia Tbk	SMGR
46	PT Golden Energy Tbk.	SMMT
47	PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk.	SQBI
48	PT Indo Acidatama Tbk	SRSN
49	PT Siantar Top Tbk	STTP
50	PT Tembaga Mulia Semanan Tbk.	TBMS
51	PT Mandom Indonesia Tbk.	TCID
52	PT Surya Toto Tbk.	TOTO
53	PT Chandra Asri Petromin Tbk	TPIA
54	PT Tempo Scan Pacific Tbk	TSPC
55	PT Unggul Indah Cahaya Tbk.	UNIC
56	PT United Tractors Tbk.	UNTR
57	PT Unilever Indonesia Tbk	UNVR
58	PT Wismilak Inti Makmur Tbk	WIIM

Tabel 2
Data Komite Audit 2016 - 2018

No	Nama	Kode	Tahun		
	Perusahaan	Perusahaan	2016	2017	2018
1	PT Asahimas Flat Glass Tbk.	AMFG	3	3	3
2	PT Astra International Tbk.	ASII	4	4	4
3	PT ASTRA OTOPARTS TBK	AUTO	3	3	3
4	PT Sepatu Bata Tbk.	BATA	3	3	3
5	PT Colorpak Indonesia Tbk.	CLPI	3	3	3
6	PT Charoend Pokhpand Tbk	CPIN	5	5	5
7	PT Delta Jakarta Tbk.	DLTA	3	3	3
8	PT INTILAND DEVELOPMENT TBK	DILD	3	3	3
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	DVLA	3	3	3
10	PT Goodyear Indonesia Tbk	GDYR	3	3	3
11	PT Hexindo Adiperkasa Tbk.	HEXA	3	3	3
12	PT Sumi Indo Kabel Tbk.	IKBI	3	3	3
13	PT Indomobil SuksesInternational Tbk	IMAS	3	3	3
14	PT Indofood Tbk	INDF	3	3	3
15	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	INTP	3	3	3
16	PT Japfaa Comfedd Tbk	JPFA	3	3	3
17	PT Kalbe Farma Tbk	KLBF	4	4	4
18	PT Malindo Feedmail Tbk	MEDC	3	3	3
19	PT Merck Tbk.	MERK	3	3	3
20	PT Multi Bintang Tbk.	MLBI	3	3	3
21	PT Petrosea Tbk.	PTRO	3	3	3
22	PT Bentoel Investama Tbk	RMBA	3	3	3
23	PT Salim Ivomas Pratama Tbk	SIMP	3	3	3
24	PT Semen Indonesia Tbk	SMGR	4	4	4
25	PT Tembaga Mulia Semanan Tbk.	TBMS	3	3	3
26	PT Mandom Indonesia Tbk.	TCID	3	3	3
27	PT Surya Toto Tbk.	TOTO	3	3	3
28	PT Chandra Asri Petromical Tbk	TPIA	3	3	3
29	PT UNITED TRACTOR TBK	UNTR	3	3	3
30	PT Unilever Indonesia Tbk	UNVR	3	3	3

Tabel 3
Data Kualitas Audit 2016 - 2018

No	Nama	Kode	Tahun		
	Perusahaan	Perusahaan	2016	2017	2018
1	PT Asahimas Flat Glass Tbk.	AMFG	1	1	1
2	PT Astra International Tbk.	ASII	1	1	1
3	PT ASTRA OTOPARTS TBK	AUTO	1	1	1
4	PT Sepatu Bata Tbk.	BATA	1	1	1
5	PT Colorpak Indonesia Tbk.	CLPI	0	0	0
6	PT Charoend Pokhpand Tbk	CPIN	0	0	0
7	PT Delta Jakarta Tbk.	DLTA	1	1	1
8	PT INTILAND DEVELOPMENT TBK	DILD	1	1	1
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	DVLA	1	1	1
10	PT Goodyear Indonesia Tbk	GDYR	0	0	0
11	PT Hexindo Adiperkasa Tbk.	HEXA	1	1	1
12	PT Sumi Indo Kabel Tbk.	IKBI	1	1	1
13	PT Indomobil SuksesInternational Tbk	IMAS	1	1	1
14	PT Indofood Tbk	INDF	1	1	1
15	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	INTP	1	1	1
16	PT Japfaa Comfedd Tbk	JPFA	1	1	1
17	PT Kalbe Farma Tbk	KLBF	1	1	1
18	PT Malindo Feedmail Tbk	MEDC	1	1	1
19	PT Merck Tbk.	MERK	1	1	1
20	PT Multi Bintang Tbk.	MLBI	0	0	0
21	PT Petrosea Tbk.	PTRO	0	0	0
22	PT Bentoel Investama Tbk	RMBA	0	0	0
23	PT Salim Ivomas Pratama Tbk	SIMP	1	1	1
24	PT Semen Indonesia Tbk	SMGR	0	0	0
25	PT Tembaga Mulia Semanan Tbk.	TBMS	0	0	0
26	PT Mandom Indonesia Tbk.	TCID	1	1	1
27	PT Surya Toto Tbk.	TOTO	1	1	1
28	PT Chandra Asri Petromical Tbk	TPIA	1	1	1
29	PT UNITED TRACTOR TBK	UNTR	1	1	1
30	PT Unilever Indonesia Tbk	UNVR	1	1	1

Tabel 4**Data Kepemilikan Manajerial 2016-2018**

No	Nama	Kode	Tahun		
	Perusahaan	Perusahaan	2016	2017	2018
1	PT Asahimas Flat Glass Tbk.	AMFG	0,00005	0,00005	0,00018
2	PT Astra International Tbk.	ASII	0,00040	0,00040	0,00050
3	PT ASTRA OTOPARTS TBK	AUTO	0,00000	0,00000	0,00000
4	PT Sepatu Bata Tbk.	BATA	0,00000	0,00000	0,00000
5	PT Colorpak Indonesia Tbk.	CLPI	0,06648	0,06648	0,06648
6	PT Charoend Pokhpand Tbk	CPIN	0,00002	0,00002	0,00002
7	PT Delta Jakarta Tbk.	DLTA	0,00000	0,00000	0,00000
8	PT INTILAND DEVELOPMENT TBK	DILD	0,00000	0,00000	0,00000
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	DVLA	0,00000	0,00000	0,00000
10	PT Goodyear Indonesia Tbk	GDYR	0,00000	0,00000	0,00000
11	PT Hexindo Adiperkasa Tbk.	HEXA	0,05074	0,05074	0,05074
12	PT Sumi Indo Kabel Tbk.	IKBI	0,00095	0,00095	0,00095
13	PT Indomobil Sukses International Tbk	IMAS	0,00000	0,00000	0,00000
14	PT Indofood Tbk	INDF	0,00016	0,00016	0,00016
15	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	INTP	0,00000	0,00000	0,00000
16	PT Japfaa Comfedd Tbk	JPFA	0,01069	0,01522	0,01432
17	PT Kalbe Farma Tbk	KLBF	0,00009	0,00009	0,00081
18	PT Malindo Feedmail Tbk	MEDC	0,01978	0,00372	0,00370
19	PT Merck Tbk.	MERK	0,02216	0,02332	0,02332
20	PT Multi Bintang Tbk.	MLBI	0,00000	0,00000	0,00000
21	PT Petrosea Tbk.	PTRO	0,00015	0,00015	0,00016
22	PT Bentoel Investama Tbk	RMBA	0,00000	0,00000	0,00000
23	PT Salim Ivomas Pratama Tbk	SIMP	0,00001	0,00001	0,00001
24	PT Semen Indonesia Tbk	SMGR	0,00003	0,00000	0,00000
25	PT Tembaga Mulia Semanan Tbk.	TBMS	0,00057	0,00057	0,00057
26	PT Mandom Indonesia Tbk.	TCID	0,00126	0,00126	0,00126
27	PT Surya Toto Tbk.	TOTO	0,00000	0,00000	0,00000
28	PT Chandra Asri Petromical Tbk	TPIA	0,00058	0,00092	0,00139
29	PT UNITED TRACTOR TBK	UNTR	0,00001	0,00000	0,00053
30	PT Unilever Indonesia Tbk	UNVR	0,00142	0,00000	0,00000

Tabel 5
Data Tax Avoidance (ETR) 2016-2018

No	Nama	Kode	Tahun		
	Perusahaan	Perusahaan	2016	2017	2018
1	PT Asahimas Flat Glass Tbk.	AMFG	0,253	0,393	0,410
2	PT Astra International Tbk.	ASII	0,178	0,206	0,218
3	PT ASTRA OTOPARTS TBK	AUTO	0,255	0,231	0,210
4	PT Sepatu Bata Tbk.	BATA	0,353	0,325	0,268
5	PT Colopak Indonesia Tbk.	CLPI	0,257	0,221	0,026
6	PT Charoend Pokhpand Tbk	CPIN	0,435	0,233	0,230
7	PT Delta Jakarta Tbk.	DLTA	0,222	0,242	0,234
8	PT INTILAND DEVELOPMENT TBK	DILD	0,196	0,109	0,899
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	DVLA	0,291	0,283	0,265
10	PT Goodyear Indonesia Tbk	GDYR	0,355	2,362	0,509
11	PT Hexindo Adiperkasa Tbk.	HEXA	0,284	0,269	0,264
12	PT Sumi Indo Kabel Tbk.	IKBI	0,266	0,253	0,268
13	PT Indomobil SuksesInternational Tbk	IMAS	0,263	1,547	0,100
14	PT Indofood Tbk	INDF	0,343	0,328	0,334
15	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	INTP	0,066	0,187	0,181
16	PT Japfaa Comfedd Tbk	JPFA	0,215	0,364	0,271
17	PT Kalbe Farma Tbk	KLBF	0,239	0,243	0,245
18	PT Malindo Feedmail Tbk	MEDC	0,214	0,473	0,988
19	PT Merck Tbk.	MERK	0,284	0,297	0,256
20	PT Multi Bintang Tbk.	MLBI	0,256	0,257	0,267
21	PT Petrosea Tbk.	PTRO	0,110	0,230	0,329
22	PT Bentoel Investama Tbk	RMBA	0,499	0,200	0,875
23	PT Salim Ivomas Pratama Tbk	SIMP	0,563	0,417	1,861
24	PT Semen Indonesia Tbk	SMGR	0,108	0,256	0,248
25	PT Tembaga Mulia Semanan Tbk.	TBMS	0,274	0,304	0,252
26	PT Mandom Indonesia Tbk.	TCID	0,268	0,263	0,262
27	PT Surya Toto Tbk.	TOTO	0,329	0,261	0,233
28	PT Chandra Asri Petromical Tbk	TPIA	0,251	0,248	0,282
29	PT UNITED TRACTOR TBK	UNTR	0,242	0,271	0,268
30	PT Unilever Indonesia Tbk	UNVR	0,254	0,253	0,252

LAMPIRAN II
HASIL OLAHAN SPSS YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2018



Tabel 6
Hasil Uji Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komite Audit	90	3.00	5.00	3.1667	.45592
Kualitas Audit	90	.00	1.00	.7333	.44469
Kepemilikan Manajerial	90	.00	.07	.0056	.01526
Tax Avoidance	90	.03	2.36	.3439	.33474
Valid n (listwise)	90				

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2020

Tabel 7
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
n		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.1222222
	Std. Deviation	.39544168
	Absolute	.116
Most Extreme Differences	Positive	.116
	Negative	-.072
Kolmogorov-Smirnov Z		1.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.174

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2020

Tabel 8
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-2.710	.672		-4.030	.000		
Komite Audit	1.106	.552	.211	2.003	.048	.927	1.079
1 Kualitas Audit	.446	.195	.240	2.279	.025	.929	1.076
Kepemilikan Manajerial	8.010	4.234	.195	1.892	.062	.971	1.030

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2020

Tabel 9
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.340 ^a	.115	.085	.64998	1.842

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Manajerial, Kualitas Audit, Komite Audit

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2020

Tabel 10
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.003	.300		-.010	.992
Komite Audit	.373	.246	.164	1.516	.133
Kualitas Audit	-.100	.087	-.124	-1.149	.254
Kepemilikan Manajerial	2.598	1.889	.146	1.375	.173

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2020

Tabel 11
Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.340 ^a	.115	.085	.64998

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Manajerial

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2020

Tabel 12
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2.710	.672		-4.030	.000
Komite Audit	1.106	.552	.211	2.003	.048
1 Kualitas Audit	.446	.195	.240	2.279	.025
Kepemilikan Manajerial	8.010	4.234	.195	1.892	.062

a. Dependent Variable: Tax Avoidance
Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2020

Tabel 13
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4.740	3	1.580	3.740	.014 ^b
1 Residual	36.333	86	.422		
Total	41.072	89			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance
b. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial,
Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2020

Tabel 14
Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2.710	.672		-4.030	.000
Komite Audit	1.106	.552	.211	2.003	.048
1 Kualitas Audit	.446	.195	.240	2.279	.025
Kepemilikan Manajerial	8.010	4.234	.195	1.892	.062

a. Dependent Variable: Tax Avoidance
Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2020